



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Januari 2022

Nomor : 910/336/SJ
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Kemendagri Tahun 2021

Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Rektor IPDN; dan
5. Staf Ahli Menteri
di -

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, telah dilakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran Tahun 2021 lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Penilaian sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan terhadap 13 indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Satuan Kerja Lingkup Kemendagri yang datanya bersumber dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kementerian Keuangan Tahun 2021. Nilai akhir IKPA Kemendagri Tahun 2021 adalah 94,46 atau turun sebesar 2,30 point dibandingkan Tahun 2020 yaitu 96,76.

Dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud diatas, terdapat beberapa permasalahan pelaksanaan anggaran T.A. 2021 lingkup Kemendagri yang mengakibatkan tidak tercapainya target yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sebesar 96, yaitu :

1. Tingginya deviasi antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran. Nilai akhir 4,09 dari target 4,5;
2. Tidak tercapainya nilai kinerja penyerapan anggaran yang ditetapkan per triwulan yaitu: Triwulan I sebesar 15 %, Triwulan II sebesar 40%, Triwulan III sebesar 60 %, dan Triwulan IV sebesar 90%. Nilai akhir 14,55 dari target 15;
3. Besarnya prosentase keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN. Nilai akhir 9,20 dari target 10;
4. Besarnya prosentase keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai. Nilai akhir 7,04 dari target 8;
5. Besarnya prosentase keterlambatan penyampaian LPJ Bendahara pada setiap bulan. Nilai akhir 4,10 dari target 5;
6. Terdapat dispensasi SPM di akhir tahun. Nilai akhir 4,75 dari target 5;
7. Secara keseluruhan Capaian Rincian Output kegiatan tidak mencapai target nasional yaitu sebesar 100%. Nilai akhir 16,63 dari target 17.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di Tahun 2022, serta **memenuhi target nilai IKPA Tahun 2022 lingkup Kemendagri maupun Satker yaitu 96**, bersama ini diminta kepada Saudara selaku Kepala Unit Kerja Eselon I untuk melakukan langkah-langkah strategis perbaikan, sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian kembali atas RKA-KL/DIPA Tahun 2022 dan segera mengajukan usulan revisi anggaran apabila diperlukan;
2. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah diajukan agar pembayaran dapat dilakukan secara tepat waktu;
3. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran serta meningkatkan ketertiban/kepatuhan dalam penyampaian data supplier dan kontrak ke KPPN;
4. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan;
5. Memerintahkan bendahara untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan dan menyampaikannya kepada KPPN setempat sebelum tanggal 10 bulan berikutnya;
6. Unit Kerja Eselon I agar melaksanakan evaluasi secara triwulanan atas pelaksanaan anggaran belanja dalam unit organisasinya dan Satker penerima penugasan/pelimpahan dalam wewenangnya;
7. Intensifkan pemantauan dan pengendalian terhadap permasalahan pengelolaan keuangan serta melakukan koordinasi penyelesaian dengan instansi terkait (internal/eksternal).
8. Unit Kerja Eselon I terkait agar menyampaikan hasil penilaian IKPA Tahun 2021 kepada satuan kerja daerah (Balai Pemdes, PPSDM, Kampus Daerah, Satker Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) dan memerintahkan untuk meningkatkan kinerjanya di Tahun 2022.
9. Terkait pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan Tahun 2021, diminta Saudara memerintahkan PPK untuk melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan dan menguji kebenarannya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dr. H. Menteri Dalam Negeri
Pdt. Sekretaris Jenderal,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:

Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021
SATKER KANTOR PUSAT DAN UPT LINGKUP KEMENDAGRI

Urutan berdasarkan Satker Terbaik

No	Uraian Satker	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Thdp Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai IKPA 2021	Nilai IKPA 2020
		Revisi DIPA	Hal III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	UP/ TUP	Rekon LPJ	Dispen SPM	Real	Selesai Tagihan	Konfirm Output	Retur SP2D	Renkas	Salah SPM				
		5	5	5	10	8	5	5	15	10	17	5	5	5	100			
1	ITJEN	5	4,80	5	-	8	5	5	15	-	17	4,96	-	4,75	74,51	75%	99,35	98,71
2	BALAI PEMDES JOGJA	5	4,28	5	10	7,6	5	5	15	10	17	5	-	5	93,88	95%	98,82	98,98
3	IPDN JATINANGOR	5	4,46	5	10	7,92	5	5	14,96	10	17	4,99	-	4,5	93,83	95%	98,76	98,78
4	IPDN KAMPUS SUMBAR	5	4,35	5	10	8	5	5	14,98	10	17	4,99	-	4,5	93,81	95%	98,75	97,65
5	DITJEN KEUDA	5	4,13	5	-	8	5	5	15	10	17	5	-	4,75	83,88	85%	98,68	99,51
6	DITJEN OTDA	5	4,47	5	10	7,76	5	5	15	10	17	4,99	5	4,25	98,47	100%	98,47	98,28
7	IPDN KAMPUS NTB	5	4,46	5	10	6,8	5	5	15	10	17	5	0	4,75	93,01	95%	97,91	98,73
8	BALAI PEMDES LAMPUNG	5	4,03	5	10	7,6	5	5	15	10	17	5	0	4,25	92,88	95%	97,76	97,33
9	PPSDM MAKASSAR	5	4,47	4,99	9,3	8	5	4,75	15	10	17	4,91	-	4,25	92,66	95%	97,54	90,11
10	DITJEN POLPUM	5	4,35	5	10	8	5	5	13,64	10	17	5	5	4,5	97,49	100%	97,49	98,28
11	IPDN KAMPUS SULSEL	5	4	5	9,1	8	5	5	15	10	17	4,98	-	4	92,43	95%	97,30	99,08
12	BPSDM	5	3,75	5	-	7,84	5	5	15	-	17	4,98	-	4,25	72,83	75%	97,11	97,03
13	BADAN LITBANG	4,38	4,39	5	10	7,2	5	5	15	10	17	4,95	-	4	91,91	95%	96,75	98,57
14	BALAI PEMDES MALANG	4,38	3,69	5	10	8	5	5	14,82	10	17	5	-	4	91,88	95%	96,72	99,12
15	IPDN KAMPUS PAPUA	5	4,35	5	9,5	6,72	5	5	15	9,8	17	4,98	-	4	91,35	95%	96,16	96,61
16	PPSDM YOGYAKARTA	5	3,39	5	10	8	5	4,75	13,32	10	17	5	-	4,75	91,21	95%	96,01	98,45
17	PPSDM BUKITTINGGI	5	1,88	5	10	8	5	5	14,71	10	17	4,97	-	4,25	90,81	95%	95,59	97,28
18	IPDN KAMPUS JAKARTA	5	4,48	5	10	7,68	4,6	5	14,99	8	17	4,93	-	4	90,67	95%	95,44	96,94
19	PPSDM BANDUNG	5	2,88	5	9,4	7,28	4,6	4,75	14,91	10	17	5	-	4,75	90,57	95%	95,34	94,29
20	SEKRETARIAT JENDERAL	5	4,34	5	7,7	7,6	5	5	14,06	9,44	17	4,95	5	4	94,09	100%	94,09	94,52
21	IPDN KAMPUS KALBAR	5	4,17	5	10	8	5	5	11,21	9,63	17	4,97	-	4,25	89,23	95%	93,92	96,25
22	DITJEN BANGDA	5	3,39	5	9,70	6,16	5	5	12,97	9,99	17	4,98	5	4,25	93,43	100%	93,43	95,94
23	DITJEN DUKCAPIL	5	3,04	5	5,2	7,6	5	5	14,28	9,83	17	4,99	5	4,5	91,44	100%	91,44	96,45
24	SATPOL PP DAMKAR (ROHIL)	5	3,88	5	10	8	0	5	13,7	10	17	5	-	4	86,58	95%	91,14	98,76
25	DKPP	5	1,33	5	-	6,4	4,6	5	14,64	-	16,89	5	-	4	67,86	75%	90,48	86,06
26	IPDN KAMPUS SULUT	5	3,55	4,89	7,1	5,04	4,6	5	15	9,17	17	4,91	-	4	85,26	95%	89,74	91,05
27	DITJEN PEMDES	5	2,93	5	8,3	5,44	5	5	12,37	9,6	17	4,98	5	4	89,63	100%	89,63	95,28
28	SATPOL PP DAMKAR (BOGOR)	5	3,90	5	10	8	4,3	5	6,52	10	17	4,97	-	4,5	84,19	95%	88,62	-
29	DITJEN ADWIL	5	2,99	4,99	7,8	6,4	3,89	4,75	11,36	9,06	15,36	4,96	5	4,25	85,80	100%	85,80	94,23
KEMENDAGRI		4,99	4,09	5,00	9,2	7,04	4,10	4,75	14,55	9,88	16,63	4,98	5	4,25	94,46	100%	94,46	96,76

Catatan: terdapat 13 Satker yang tidak mencapai target nilai sesuai Renstra sebesar 96

Sumber : OM-SPAN Kementerian Keuangan per tanggal 24 Januari 2022